

STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN WAJO

2023

Volume 2, 2024



STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN WAJO

2023

Volume 2, 2024

<https://wajokab.bps.go.id>



STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO 2023

Volume 2,2024

No. Publikasi: 73130.2409

Katalog: 4301002.7313

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: x+49 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Sumber Ilustrasi:

Canva

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

TIM PENYUSUN
STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO 2023

Volume 2,2024

Penanggung Jawab Umum

Ir. Rustan, M.Si

Penanggung Jawab Teknis/Editor

Bina Sulistiana, S.ST., M.A.P.

Penulis

Bina Sulistiana, S.ST., M.A.P.

Siti Andhasah, S.Tr.Stat.

Tata letak

Siti Andhasah, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Bidang pendidikan menjadi tujuan ke-4 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023—2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Publikasi ini menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Wajo berdasarkan hasil Susenas Maret 2023. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Informasi dasar yang disajikan diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan angka buta huruf.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Sengkang, Juni 2024

**Kepala BPS
Kabupaten Wajo**



Ir. Rustan, M.Si

DAFTAR ISI
STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO 2023

Volume 2, 2024

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
BAB II PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Sumber Data	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II METODOLOGI	7
2.1 Ruang Lingkup	7
2.2 Kerangka Sampel	8
2.3 Rancangan Sampel	9
2.4 Metode Pengumpulan Data	9
2.5 Pengolahan Data	10
BAB III KONSEP DAN DEFINISI	11
BAB IV PARTISIPASI SEKOLAH	17
4.1 Partisipasi Siswa Pada PAUD	17
4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP, dan SMA	19
4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA	22
BAB V CAPAIAN PENDIDIKAN	27
5.1 Buta Huruf	27

5.2	Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi	31
5.3	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	33
BAB VI SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN		35
6.1	Jumlah Sekolah	35
6.2	Jumlah Guru	38
6.3	Jumlah Murid	40
6.4	Rasio Murid Terhadap Guru	43
BAB VII PENUTUP		47
LAMPIRAN		49

Daftar Tabel

Tabel 1	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023	18
Tabel 2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), Tahun 2022 dan 2023	21
Tabel 3	Angka Partisipasi Murni menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023	24
Tabel 4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023	29
Tabel 5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Wajo (Persen), 2023	31
Tabel 6	Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2023	32
Tabel 7	Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan dan Jenjang di Kabupaten Wajo, 2023/2024	35
Tabel 8	Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2023/2024	37
Tabel 9	Jumlah Guru di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wajo, 2023/2024	39
Tabel 10	Jumlah Guru di Bawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, Tahun 2023/2024	40
Tabel 11	Jumlah Murid di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2023/2024	41
Tabel 12	Jumlah Murid di Bawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2023/2024	43
Tabel 13	Jumlah dan Rasio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Wajo, 2023/2024	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan.

Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yakni SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas Pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yakni SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin 1996, 24). Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Di samping sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling terkait.

Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi. Terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antar penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kultur sosial dan budaya yang berbeda antar daerah juga masih cukup kuat memberi warna

terhadap kesempatan memperoleh pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun bagi penduduk perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah Wajo, dengan sumber daya alam yang ada di Wajo, pemerintah perlu mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Wajo bersaing dalam tataran global.

Beberapa indikator pendidikan disajikan dalam publikasi “Statistik Pendidikan Kabupaten Wajo 2023” sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan di bidang pendidikan. Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023.

Selain itu, digunakan data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2023/2024 semester ganjul. Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Wajo akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk/angka melek huruf), tingkat partisipasi sekolah yang meliputi angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), serta tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan siswa menurut jenjang pendidikan dan partisipasi sekolah anak usia prasekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya

Program Wajib Belajar 12 Tahun dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.2 Tujuan

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Kabupaten Wajo;
2. Menyediakan data dasar pendidikan Kabupaten Wajo untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan; dan
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

1.3 Sumber Data

Data dan informasi pendidikan bersumber dari Susenas Kor Maret 2023. Susenas merupakan survei semesteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia.

Sampel Susenas Kabupaten Wajo tersebar di 14 Kecamatan yang mencakup 660 rumah tangga baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Selain itu, data sekunder mengenai pendidikan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2023/2024 semester ganjil.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wajo 2023 tersusun atas tujuh bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika:

- BAB I. PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, tujuan penulisan, sumber data, dan sistematika penulisan.
- BAB II. METODOLOGI, meliputi ruang lingkup, kerangka sampel, rancangan sampel, metode pengumpulan data, pengolahan data.
- BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.
- BAB IV. PARTISIPASI SEKOLAH, meliputi Partisipasi Siswa Pendidikan Prasekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).
- BAB V. CAPAIAN PENDIDIKAN, meliputi Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, penduduk yang tidak bersekolah lagi, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
- BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, meliputi jumlah sekolah, jumlah pendidik, jumlah siswa, dan rasio murid/siswa terhadap guru.
- BAB VII. PENUTUP, meliputi kesimpulan.

BAB II

METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

2.1 Ruang Lingkup

Susenas Maret 2023 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di dalam blok sensus biasa. Jumlah sampel Susenas Maret 2023 di Kabupaten Wajo sebanyak 660 rumah tangga, tersebar dalam 66 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel tersebut dicacah dengan kuesioner VSEN22.K dan VSEN22.KP.

Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan. Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi

beberapa blok sensus. pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

2.2 Kerangka Sampel

Stratifikasi dilakukan pada level blok sensus dan pada level rumah tangga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan representative sample. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (*explicit stratification*), sedangkan *implicit stratification* diterapkan pada level rumah tangga.

1. Seluruh populasi blok sensus biasa 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan.
2. *Implicit stratification* rumah tangga di blok sensus terpilih dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga untuk meningkatkan keterwakilan dari keragaman karakteristik sosial ekonomi rumah tangga.

Kerangka sampel yang digunakan adalah:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah:
 - i. Daftar populasi blok sensus biasa 2020 yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi perkotaan/perdesaan
 - ii. Daftar blok sensus 2020 yang terpilih sebagai *Master Sampling Frame*.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan kepala rumah tangga hasil pemutakhiran (*updating*) di setiap blok sensus terpilih.

2.3 Rancangan Sampel

Desain yang diterapkan pada Susenas Maret adalah stratified *two stage sampling* dengan tahapan pemilihan sampel sebagai berikut:

Tahap 1:

- a) Memilih sebanyak n_{gh} blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS), dengan *size* jumlah keluarga yang tersedia pada kerangka sampel. Pemilihan dilakukan secara independen antara strata perkotaan dan strata perdesaan di setiap kabupaten/kota. Dari hasil pemilihan ini diperoleh *Master Sampling Frame* blok sensus.
- b) Memilih sejumlah n'_{gh} blok sensus sesuai alokasi secara *systematic sampling* pada setiap strata perkotaan dan strata perdesaan di setiap kabupaten/kota.

Tahap 2:

Memilih 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari hasil pemutakhiran pada setiap blok sensus terpilih dengan terlebih dahulu melakukan *implicit stratification* menurut tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilaksanakan pada Maret 2023. Sampel total Susenas Maret 2023 di Kabupaten Wajo sebanyak 660 rumah tangga. Pengumpulan data dari rumah tangga sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden oleh petugas pencacah. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui

karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5 Pengolahan Data

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dan jawaban lainnya. Proses perekaman data dilakukan di BPS kabupaten/kota.

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Pembatasan kerangka berpikir dibuat untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Contoh satuan pendidikan prasekolah pada jalur **pendidikan formal** adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
Contoh satuan pendidikan prasekolah pada jalur **pendidikan nonformal** adalah PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
2. **Mengikuti pendidikan prasekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah.

3. **Dapat membaca dan menulis** artinya jika seseorang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a – z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh: huruf jawa, kanji, dll). **Kalimat sederhana** adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Seorang tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya tidak digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis.
4. **Bersekolah** adalah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal.
5. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
 - a) **Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).
 - b) **Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 - c) **Jenjang pendidikan tinggi** merupakan jenjang Pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi:

- **Pendidikan akademik** merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.
- **Pendidikan vokasi** merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- **Pendidikan Profesi** merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspecialis, program insinyur profesional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan

profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

6. **Jenjang pendidikan nonformal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26).
7. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
8. **Masih bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
9. **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
10. **Pendidikan tertinggi** yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
11. **Angka partisipasi sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.

12. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.
13. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

<https://wajokab.bps.go.id>

BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan ke dalam APS.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat Pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan sederajat SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan sederajat SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan sederajat SMA. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, juga akan dilakukan kajian terhadap partisipasi tingkat prasekolah. Kajian tentang Angka Partisipasi Sekolah dan Prasekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

4.1 Partisipasi Siswa Pada PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini juga biasa disebut pendidikan prasekolah.

Kegiatan prasekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan, akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak pada masa mendatang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak (Hilary Clinton, 1998).

Tabel 1.
Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023

Karakteristik	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	17,82	32,27
Perempuan	36,27	29,78
Tipe Daerah		
Perkotaan	24,03	29,15
Perdesaan	28,63	32,20
Total	27,16	31,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022 dan 2023

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2023 menunjukkan pada pendidikan prasekolah untuk usia 0-6 tahun dapat dilihat secara total angka partisipasinya meningkat yakni dari 27,16 persen menjadi 31,10 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan prasekolah bagi anak mereka. Secara gender bisa dilihat bahwa Pendidikan prasekolah selama tahun 2022 didominasi oleh anak perempuan

sedangkan tahun 2023 didominasi oleh anak laki-laki. Selisih partisipasi sekolah usia 0-6 tahun antara anak laki-laki dan perempuan pun tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua tidak lagi memandang gender dalam mendaftarkan anak mereka ke pendidikan prasekolah. Jika berdasarkan daerah tempat tinggalnya, partisipasi anak usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah lebih banyak di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan, baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023.

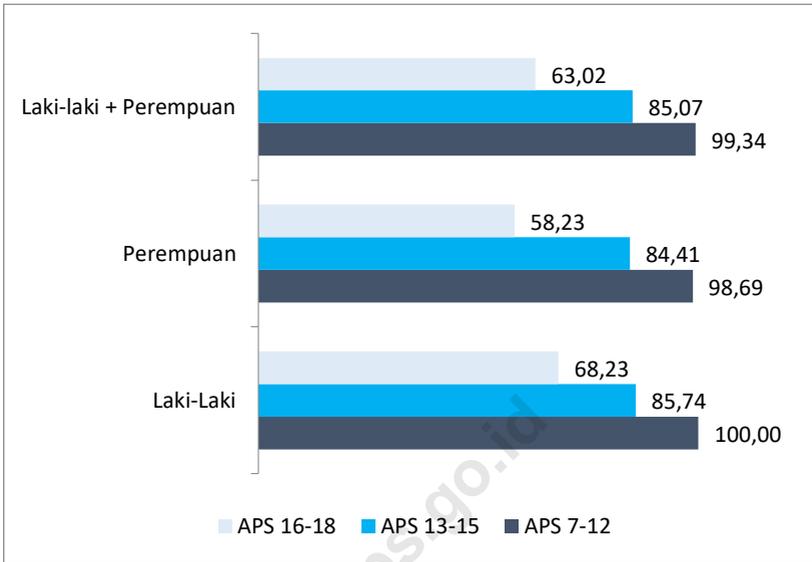
4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SMP, dan SMA

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS dapat diartikan sebagai ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$APS_{SD} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih sekolah}}{\text{Penduduk usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang masih sekolah}}{\text{Penduduk usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$



Gambar 1.
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Wajo (Persen), 2023

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2023 hasilnya disajikan pada gambar 1. Pada gambar 1 terlihat bahwa APS SD di Kabupaten Wajo sebesar 99,34 persen. Artinya, hampir seluruh anak usia 7-12 tahun di Wajo sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Pada jenjang menengah, angka APS jenjang SMP (13-15 tahun) sebesar 85,07 persen sedangkan jenjang SMA (16-18 tahun) baru mencapai 62,81 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat SMA. Lebih besar persentase laki-laki yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dibandingkan perempuan.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, tabel 2 di bawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terjadi di kabupaten Wajo selama dua tahun terakhir.

Tabel 2.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023

Angka Partisipasi Sekolah	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS 7-12	100,00	99,39	99,70	100,00	98,69	99,34
APS 13-15	85,23	82,50	84,01	85,74	84,41	85,07
APS 16-18	55,20	70,03	62,81	68,23	58,23	63,02

Catatan: L=Laki-laki; P = Perempuan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022 dan 2023

A. APS Usia 7-12 Tahun

Secara umum, angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-12 tahun 2023 di Kabupaten Wajo sedikit turun jika dibanding dengan tahun sebelumnya. APS 7-12 tahun Kabupaten Wajo tahun 2022 sebesar 99,70 dan tahun 2023 sebesar 99,34 persen. Pada tahun 2022 dan 2023 APS usia 7-12 tahun untuk anak laki-laki bahkan sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di tingkat SD sebagai upaya pengentasan buta aksara di Kabupaten Wajo bisa dikatakan berhasil.

B. APS Usia 13-15 Tahun

Meskipun capaian Angka APS usia 13-15 tidak setinggi APS 7-12 tahun, angka partisipasi pada jenjang ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya.

APS Kabupaten Wajo untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2022 masih berada di angka 84,01 persen meningkat menjadi 85,07 persen pada tahun 2023. Kemajuan yang positif juga terlihat dari sisi gender, APS laki-laki maupun perempuan juga meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan partisipasi pada jenjang ini tidak terlalu signifikan, hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan atas program-program pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Di sisi lain, baik pada tahun 2022 maupun 2023, APS laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan.

C. APS Usia 16-18 Tahun

Tidak jauh berbeda dengan APS usia 13-15 tahun, APS usia 16-18 tahun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. APS SMA Wajo tahun 2023 sebesar 63,02 persen. Meskipun demikian, APS pada kelompok umur ini masih berada jauh dibawah APS Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 71,00 persen. Dari gender bisa dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase APS perempuan jenjang SMA lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun pada tahun 2023 justru sebaliknya.

4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA

Selain APS, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk

melakukan kajian di ketiga jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang sederajat SD, SMP, dan SMA. Lebih spesifik manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut:

$$APM_{SD} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah SD usia 7 – 12 tahun}}{\text{Penduduk Usia 7 – 12 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang masih sekolah SMP usia 13 – 15 tahun}}{\text{Penduduk usia 13 – 15 tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yg masih sekolah SMA usia 16 – 18 tahun}}{\text{Penduduk usia 16 – 18 tahun}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) Wajo di pada jenjang pendidikan SD dan SMA mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada jenjang SMP sedikit mengalami peningkatan (tabel 3). Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti juga menurun. Hal ini mungkin disebabkan adanya anak yang berusia di batas *cut-off* perhitungan APM tiap jenjang sudah bersekolah di jenjang yang lebih tinggi. Misalnya ada anak usia 12 tahun yang sudah sekolah SMP sehingga tidak masuk pada perhitungan APM SD. Begitupun pada jenjang SMP dan SMA. Ada anak usia 15 tahun sudah sekolah

di jenjang SMA dan ada anak yang berusia 18 tahun namun sudah lulus SMA.

Tabel 3.
Angka Partisipasi Murni menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023

Angka Partisipasi Murni	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APM SD	100,00	99,39	99,70	99,60	98,65	99,12
APM SMP	63,36	66,99	64,98	60,21	70,04	65,17
APM SMA	49,24	59,88	54,71	62,46	46,19	53,98

Catatan: L=Laki-laki; P = Perempuan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022 dan 2023

A. APM SD

APM SD digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah anak SD ditinjau dari ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2023, APM SD di Wajo sebesar 99,12 sedikit menurun dibandingkan tahun 2022. Pada Tabel 3 terlihat bahwa angka APM Wajo dari tahun 2023 antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Seiring dengan waktu, perbedaan APM SD antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang. Tinggi rendahnya nilai APM ini lebih disebabkan oleh kesesuaian penduduk usia 7-12 tahun yang sedang duduk di SD.

B. APM SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Wajo sedikit mengalami peningkatan dari 64,98 persen di tahun 2022 menjadi

65,17 di tahun 2023. Jika dilihat dari sisi gender, APM SMP perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki baik pada tahun 2022 maupun 2023. Bahkan pada tahun 2023, perbedaan APM SMP antara laki-laki dan perempuan mencapai 10 persen. Dengan kata lain, perhatian dan wawasan masyarakat tentang pendidikan belum sepenuhnya terbuka.

C. APM SMA

Pada tahun 2023, APM SMA Wajo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 APM SMA mencapai 54,71 persen dan turun menjadi 53,98 persen pada 2023. APM SMA di Kabupaten Wajo masih tergolong rendah dikarenakan porsi yang sekolah di bangku SMA hampir sama dengan yang tidak sekolah. Penurunan APM tersebut meskipun kecil, tetap perlu perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

BAB V

CAPAIAN PENDIDIKAN

5.1 Buta Huruf

Buta huruf adalah kondisi seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya seperti huruf jawa, kanji, dll. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka Buta Huruf (ABH) penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong buta huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan angka tersebut adalah sebagai:

1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih buta huruf;
2. Tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; dan
3. Alat untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem

pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan katakata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran (Pergub Kabupaten Wajo No 1 Tahun 2019).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dalam rangka melanjutkan Upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada 2015 lalu. Salah satu target dalam Tujuan 4, yakni Target 4.6.

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Salah satu indikator dalam Tujuan 4 adalah 4.6.1.(a) persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas. Indikator tersebut merupakan indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Sebagai bagian dari dunia global, Wajo juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Dalam Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial disebutkan bahwa AMH merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator tersebut kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. AMH dan

ABH merupakan indikator yang nilainya saling berbanding terbalik. Semakin tinggi AMH suatu wilayah berarti ABH akan semakin rendah.

Tabel 4.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023

Kemampuan Baca Tulis	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buta Huruf	5,95	10,10	8,12	7,65	12,29	10,11
Melek Huruf	94,05	89,90	92,88	92,35	87,71	89,89

Catatan: L=Laki-laki; P = Perempuan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022 dan 2023

Pada 2023 tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas di Wajo yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 89,89 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Wajo mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 10,10 persen agar target pada 2023 terpenuhi. Budaya literasi harus ditingkatkan karena merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, paket C, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan

menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Pada tabel 4 tersaji potret kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas di Wajo. Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada 2023, persentase penduduk perempuan yang buta huruf masih lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Persentase penduduk laki-laki yang buta huruf mengalami peningkatan dari tahun 2022 lalu begitu pula dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2023, penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 12,29 persen. Sedangkan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa baca tulis sebanyak 7,65 persen. Keadaan tersebut perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Wajo. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A dan paket B yang mengarah pada tujuan penuntasan buta huruf harus lebih ditingkatkan.

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Angka buta huruf menurut kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Tabel 5 menyajikan angka buta huruf menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas) di Wajo tahun 2023.

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebaran penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf sebagian besar berada pada kelompok

lansia (60 tahun ke atas). Secara total (penduduk laki-laki dan penduduk perempuan), penduduk lansia yang buta huruf/buta aksara sebanyak 31,72 persen. Selanjutnya, penduduk dewasa yang buta aksara sebanyak 5,73 persen dan tidak ada penduduk remaja yang mengalami buta aksara. Secara total, penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf cenderung menurun jika dilihat menurut kelompok umur.

Tabel 5.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Wajo (Persen), 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
15-24	-	-	-
25-59	5,61	5,85	5,73
60+	20,50	40,17	31,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023

Penduduk perempuan yang buta huruf baik kelompok lansia maupun kelompok dewasa lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yang buta huruf. Persentase perempuan yang buta huruf pada kelompok lansia bahkan mencapai dua kali lipat dari persentase laki-laki lansia yang buta huruf. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kesadaran masyarakat dulu bahwa pendidikan bagi perempuan tidak penting bagi laki-laki.

5.2 Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dengan melaksanakan berbagai program ke arah

tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas adalah melalui peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang. Selain itu, dengan melakukan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023- 2024. Harapannya tidak ada anak usia 7-23 tahun yang tidak bersekolah.

Tabel 6.
Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2023

Status Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Pernah Sekolah	1,48	0,42	0,95
Masih sekolah	71,09	68,99	70,04
SD/Sederajat	33,46	31,91	32,69
SMP/Sederajat	12,30	13,91	13,10
SMA/Sederajat	15,42	12,77	14,10
Perguruan Tinggi	9,91	10,39	10,15
Tidak Bersekolah Lagi	27,43	30,60	29,01

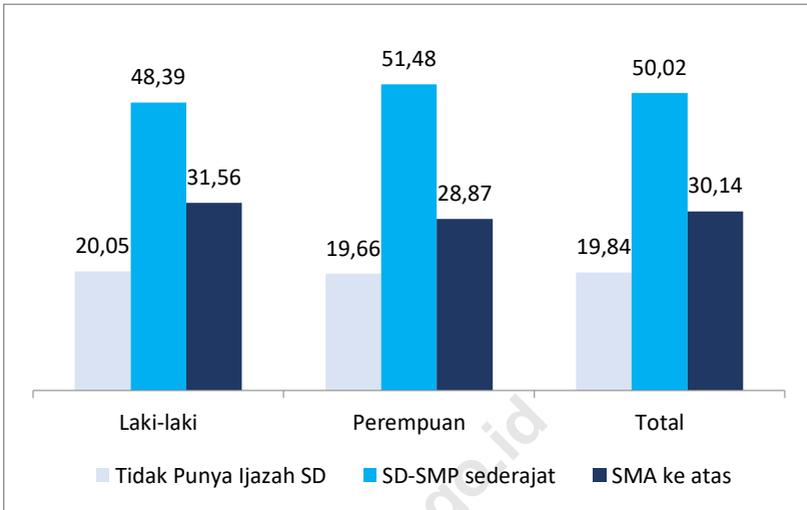
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023

Sebagai informasi, pada analisis ini terdapat penyesuaian dengan Metadata SDGs dibandingkan tahun sebelumnya dimana sebelumnya menggunakan kelompok usia sekolah 7-24 tahun dan kini menggunakan kelompok usia sekolah 7-23 tahun. Dari Tabel 6 terlihat pada 2023 anak usia 7-23 tahun yang masih duduk di bangku sekolah sebesar 70,04 persen. Jika dirinci menurut partisipasi sekolah, terdapat sebanyak 0,95 persen anak usia 7-23 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan terdapat sebanyak 29,01 persen anak usia 7-23 tahun yang tidak bersekolah lagi (anak tidak sekolah/ATS).

Seperti yang dijelaskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2023-2024, ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Jika ditinjau dari jenis kelamin, pada 2023, anak perempuan usia 7-23 tahun yang masih bersekolah (68,99 persen) lebih rendah dari anak laki-laki (71,09 persen). Hal itu berarti, pada 2023, ATS laki-laki lebih rendah sekitar 3,17 persen dari ATS perempuan.

5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambar 2 menunjukkan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Wajo. Pada tahun 2023, sebesar 50,02 persen penduduk usia 15 tahun ke atas telah menamatkan jenjang pendidikan dasar, yakni sederajat SD dan SMP. Meskipun demikian, masih ada 19,84 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah. Sementara itu, baru 30,14 persen penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMA ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum sepenuhnya berhasil di Kabupaten Wajo. Angka ini juga dapat menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk bahan evaluasi terkait pendidikan di Wajo. Harapannya penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMA ke atas lebih banyak dibandingkan yang menamatkan jenjang pendidikan di bawahnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan sangat berkorelasi dengan berbagai variabel vital seperti kemiskinan dan pengangguran. Karena pendidikan yang tinggi dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.



Gambar 2.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2023

Jika ditinjau dari jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan dasar tidak terlalu timpang. Namun demikian, persentase penduduk laki-laki yang berhasil menamatkan pendidikan dasar lebih rendah daripada penduduk perempuan. Sedangkan penduduk yang menamatkan SMA ke atas laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah tidak jauh berbeda dibanding penduduk laki-laki. Artinya, kesenjangan gender di bidang pendidikan sudah mulai berkurang. Anak perempuan yang putus sekolah sudah mulai berkurang dan harapannya kejadian perkawinan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak juga mulai berkurang.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

6.1 Jumlah Sekolah

Facilities pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Tabel 7 menyajikan jumlah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut kecamatan dan menurut status sekolah di Kabupaten Wajo tahun ajaran 2023/2024. Terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang TK sebanyak 186 sekolah, jenjang SD sebanyak 389 sekolah, jenjang SMP sebanyak 74 sekolah, jenjang SMA sebanyak 19 sekolah, dan jenjang SMK sebanyak 12 sekolah.

Tabel 7.
Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan dan Jenjang di Kabupaten Wajo, 2023/2024

Kecamatan	TK			SD			SMP		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sabbangparu	-	15	15	28	-	28	4	-	4
Tempe	1	32	33	33	6	39	8	1	9
Pamma	1	13	14	34	4	38	6	-	6
Bola	-	8	8	28	-	28	3	1	4
Takkalalla	2	6	8	25	-	25	6	-	6
Sajoanging	7	8	15	20	-	20	5	-	5
Penrang	9	1	10	18	-	18	5	-	5
Majauleng	4	9	13	38	-	38	5	-	5
Tanasitolo	8	10	18	32	1	33	5	-	5
Belawa	1	9	10	33	2	35	5	1	6
Maniang Pajo	-	10	10	16	-	16	4	1	5
Gilireng	-	8	8	16	-	16	4	-	4
Keera	6	6	12	23	-	23	5	-	5
Pitumpanua	4	8	12	31	1	32	5	-	5
Wajo	43	143	186	375	14	389	70	4	74

Lanjutan Tabel 7.

Kecamatan	SMA			SMK		
	N	S	J	N	S	J
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sabbangparu	1	-	1	1	-	1
Tempe	3	1	4	-	3	3
Pamma	1	-	1	-	-	-
Bola	1	1	2	1	-	1
Takkalalla	1	-	1	-	-	-
Sajoanging	1	-	1	1	-	1
Penrang	1	-	1	-	-	-
Majauleng	1	-	1	1	-	1
Tanasitolo	-	-	-	1	-	1
Belawa	1	-	1	1	-	1
Maniang Pajo	1	1	2	-	-	-
Gilireng	-	-	-	1	-	1
Keera	1	-	1	1	-	1
Pitumpanua	2	1	3	1	-	1
Wajo	15	4	19	9	3	12

Catatan: N = Negeri; S = Swasta; J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil Tahun 2023/2024

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggara pendidikan di seluruh jenjang didominasi oleh pihak pemerintah/negeri dibandingkan pihak swasta, kecuali jenjang TK. Terdapat perbedaan yang cukup jauh antara persentase sekolah TK di Kabupaten Wajo yang berada di pihak swasta dengan pemerintah. Persentase sekolah yang berada di pihak swasta mencapai 76,88 persen, sedangkan 23,12 persen diantaranya berada di pihak pemerintah atau negeri.

Selanjutnya, untuk jenjang Pendidikan menengah atas yakni jenjang SMA dan SMK, persentase sekolah setingkat SMA dan setingkat SMK tidak terlalu berbeda jauh, yakni 58,82 persen (20

sekolah) berbanding 41,18 persen (14 sekolah). Jumlah sekolah setingkat SMK yang cukup bersaing dengan SMA diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan sebagai sarana tercipta sumber daya manusia yang siap bekerja secara profesional di bidangnya. Harapannya terjadi kemajuan maksimal antara laju pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Tabel 8.
Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2023/2024

Kecamatan	RA	MI			MTs			MA		
		N	S	J	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sabbangparu	-	-	2	2	-	3	3	-	3	3
Tempe	5	-	7	7	-	6	6	-	4	4
Pamma	1	1	2	3	1	3	4	-	1	1
Bola	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Takkalalla	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Sajoangng	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penrang	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Majauleng	7	-	2	2	-	4	4	-	3	3
Tanasitolo	11	-	2	2	-	3	3	-	1	1
Belawa	2	-	13	13	-	5	5	1	3	4
Maniang Pajo	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Gilireng	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Keera	1	-	1	1	-	3	3	-	3	3
Pitumpanua	12	3	8	11	1	7	8	-	3	3
Wajo	42	4	39	43	2	38	40	1	23	24

Catatan: N = Negeri; S = Swasta; J = Jumlah

Sumber: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil Tahun 2023/2024

Selanjutnya selain di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 149 sekolah yang berada di bawah Kementrian Agama yang terdiri atas 42 sekolah jenjang RA (Raudhatul Athfal), 43 sekolah jenjang MI (Madrasah Ibtidaiyah), 40 sekolah jenjang MTs (Madtrasah Tsanawiyah), dan 24 jenjang

MA(Madrasah Aliyah). Berbeda dengan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama mayoritas didominasi oleh yang berstatus Swasta. Hal ini dikarenakan, tugas utama kementerian Agama bukan berada di bidang pendidikan. Hal ini sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai agama diantara banyaknya bidang kehidupan.

6.2 Jumlah Guru

Tabel 9 menyajikan jumlah pendidik/guru menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Wajo tahun ajaran 2023/2024 yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah guru sebanding dengan jumlah sekolah. Banyaknya jumlah sekolah memengaruhi jumlah tenaga pendidik di dalamnya. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah guru dari jenjang SD sampai SMA dan SMK di Kabupaten Wajo sebanyak 5.145. Jumlah guru terbanyak adalah guru SD yakni sebanyak 3242 orang. Adapun apabila dilihat menurut kecamatan, guru SD terbanyak berada di Kecamatan Tempe. Hal ini sejalan dengan Kecamatan Tempe sebagai ibukota dari Kabupaten Wajo yang merupakan wilayah padat penduduk.

Tabel 9. Jumlah Guru di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wajo, 2023/2024

Kecamatan	SD			SMP		
	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sabbangparu	241	-	241	51	-	51
Tempe	387	84	471	187	10	197
Pammana	250	28	278	83	-	83
Bola	233	-	233	38	9	47
Takkalalla	191	-	191	61	-	61
Sajoanging	163	-	163	65	-	65
Penrang	150	-	150	53	-	53
Majauleng	311	-	311	83	-	83
Tanasitolo	263	7	270	83	-	83
Belawa	238	7	245	85	12	97
Maniang Pajo	154	-	154	64	6	70
Gilireng	122	-	122	47	-	47
Keera	162	-	162	57	-	57
Pitumpanua	247	4	251	85	-	85
Wajo	3.112	130	3.242	1.042	37	1.079

Lanjutan Tabel 9.

Kecamatan	SMA			SMK		
	N	S	J	N	S	J
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sabbangparu	26	-	26	34	-	34
Tempe	178	4	182	-	18	18
Pammana	27	-	27	-	-	-
Bola	18	5	23	20	-	20
Takkalalla	35	-	35	-	-	-
Sajoanging	16	-	16	20	-	20
Penrang	25	-	25	-	-	-
Majauleng	30	-	30	28	-	28
Tanasitolo	-	-	-	68	-	68
Belawa	27	-	27	22	-	22
Maniang Pajo	39	6	45	-	-	-
Gilireng	-	-	-	24	-	24
Keera	19	-	19	11	-	11
Pitumpanua	68	11	79	45	-	45
Wajo	508	26	534	272	18	290

Catatan: N = Negeri; S = Swasta; J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil Tahun 2023/2024

Adapun jumlah guru di sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dari jenjang MI sampai MA sebanyak 1.513 orang. Jumlah guru terbanyak berada pada jenjang MTs yakni sebanyak 719 orang. Jenjang MI sebanyak 412 orang, dan di jenjang MA sebanyak 382 orang.

Tabel 10.
Jumlah Guru di Bawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, Tahun 2023/2024

Kecamatan	MI			MTs			MA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sabbangparu	-	15	15	-	54	54	-	33	33
Tempe	-	73	73	-	213	213	-	74	74
Pammaana	14	14	28	14	45	59	-	13	13
Bola	-	-	-	-	13	13	-	-	-
Takkalalla	-	13	13	-	-	-	-	-	-
Sajoanging	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penrang	-	-	-	-	24	24	-	12	12
Majauleng	-	15	15	-	49	49	-	46	46
Tanasitolo	-	14	14	-	59	59	-	34	34
Belawa	-	124	124	-	69	69	59	29	88
Maniang Pajo	-	-	-	-	9	9	-	7	7
Gilireng	-	-	-	-	6	6	-	-	-
Keera	-	1	1	-	20	20	-	20	20
Pitumpanua	66	63	129	48	96	144	-	55	55
Wajo	80	332	412	62	657	719	59	323	382

Catatan: N = Negeri; S = Swasta; J = Jumlah

Sumber: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil Tahun 2023/2024

6.3 Jumlah Murid

Tabel 11 menyajikan jumlah murid/siswa menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Wajo tahun ajaran 2023/2024. Secara total, terdapat 56.354 murid yang bersekolah di jenjang SD sampai SMK di Wajo pada tahun ajaran 2023/2024.

Apabila diamati lebih lanjut, jumlah murid di Kabupaten Wajo mengikuti pola seperti U terbalik. Jumlah murid meningkat sampai level SD, dan menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Jumlah murid SD menjadi dominan karena pada jenjang SD memiliki 6 tingkas kelas. Kecamatan Tempe masih mendominasi jumlah murid terbanyak di Kabupaten Wajo.

Tabel 11.
Jumlah Murid di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2023/2024

Kecamatan	SD			SMP		
	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sabangparu	2.057	-	2.057	382	-	382
Tempe	5.307	1.253	6.560	2.307	78	2.385
Pamma	2.459	302	2.761	574	-	574
Bola	2.191	-	2.191	445	46	491
Takkalalla	1.837	-	1.837	757	-	757
Sajoanging	1.868	-	1.868	612	-	612
Penrang	1.495	-	1.495	374	-	374
Majauleng	2.982	-	2.982	796	-	796
Tanasitolo	3.411	104	3.515	685	-	685
Belawa	1.844	124	1.968	604	180	784
Maniang Pajo	1.654	-	1.654	542	83	625
Gilireng	1.161	-	1.161	386	-	386
Keera	2.328	-	2.328	538	-	538
Pitumpanua	3.266	60	3.326	938	-	938
Wajo	33.860	1.843	35.703	9.940	387	10.327

Lanjutan Tabel 11.

Kecamatan	SMA			SMK		
	N	S	J	N	S	J
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sabbangparu	304	-	304	147	-	147
Tempe	2.755	34	2.789	-	96	96
Pamma	512	-	512	-	-	-
Bola	195	39	234	51	-	51
Takkalalla	540	-	540	-	-	-
Sajoanging	275	-	275	118	-	118
Penrang	346	-	346	-	-	-
Majauleng	442	-	442	177	-	177
Tanasitolo	-	-	-	780	-	780
Belawa	297	-	297	253	-	253
Maniang Pajo	544	65	609	-	-	-
Gilireng	-	-	-	269	-	269
Keera	341	-	341	68	-	68
Pitumpanua	967	134	1.101	575	-	575
Wajo	7.518	272	7.790	2.438	96	2.534

Catatan: N = Negeri; S = Swasta; J = Jumlah

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil Tahun 2023/2024

Apabila menurut data Kementerian Agama (tabel 12), jumlah murid di Kabupaten Wajo sebanyak 15.251 orang. Jumlah murid jenjang MI sebanyak 4.712 orang, jenjang Mts sebanyak 6.979 orang, dan jenjang MA sebanyak 3560 orang. Sebanyak 87,88 persen murid berasal dari sekolah swasta di bawah naungan Kementerian Agama.

Tabel 12.
Jumlah Murid di Bawah Kementerian Agama menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2023/2024

Kecamatan	MI			MTs			MA		
	N	S	J	N	S	J	N	S	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sabbangparu	-	126	126	-	669	669	-	361	361
Tempe	-	963	963	-	1.733	1.733	-	764	764
Pammana	88	124	212	76	374	450	-	142	142
Bola	-	-	-	-	126	126	-	-	-
Takkalalla	-	110	110	-	-	-	-	-	-
Sajoanging	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penrang	-	-	-	-	240	240	-	102	102
Majauleng	-	197	197	-	457	457	-	544	544
Tanasitolo	-	76	76	-	593	593	-	367	367
Belawa	-	1.438	1.438	-	801	801	372	197	569
Maniang Pajo	-	-	-	-	39	39	-	11	11
Gilireng	-	-	-	-	25	25	-	-	-
Keera	-	17	17	-	238	238	-	123	123
Pitumpanua	798	775	1.573	514	1.094	1.608	-	577	577
Wajo	886	3.826	4.712	590	6.389	6.979	372	3.188	3.560

Catatan: N = Negeri; S = Swasta; J = Jumlah

Sumber: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil Tahun 2023/2023

6.4 Rasio Murid Terhadap Guru

Kualitas dan distribusi guru yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka tersebut menggambarkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio tersebut di suatu sekolah, semakin berkurang efektivitas proses belajar mengajar. Hal tersebut terjadi karena pengawasan dan perhatian guru terhadap murid cenderung berkurang sehingga kualitas pengajaran akan semakin rendah.

Tabel 13.
Jumlah dan Rasio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Wajo, 2023/2024

Kelompok Umur	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	35.703	3.242	11,01
SMP	10.327	1.079	9,57
SMA	7.790	534	14,59
SMK	2.534	290	8,74

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganji 2023/2024

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 murid. Sedangkan, seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 15 murid. Tabel 13 menyajikan data rasio murid-guru. Dari tabel tersebut terlihat rasio murid-guru jenjang SD sampai SMA di Wajo cukup jauh berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan. Hal serupa juga terjadi pada jenjang SMK meskipun selisih rasio murid-guru dengan nilai ideal yang ditetapkan tidak terlalu tinggi.

Meskipun demikian, rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator penentu kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan.

Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas dapat melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga

kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru, yakni S1/DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik.

<https://wajokab.bps.go.id>

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dari hasil kajian data Susenas 2023 sebelumnya dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Wajo.

1. Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, partisipasi anak usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti Pendidikan prasekolah lebih banyak di daerah perdesaan daripada didaerah perkotaan. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu terutama di beberapa kabupaten yang capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata- rata Kabupaten Wajo.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Kabupaten Wajo, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.
3. Hingga tahun 2023 masih terdapat 10,11 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf/ tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana di Wajo. Jika dirinci menurut kelompok umur, masih terdapat 5,73 persen penduduk usia 25-29 tahun dan 31,72 persen penduduk usia 60 tahun keatas yang buta huruf.

4. Pada 2023, sebagian besar (50,02 persen) penduduk Wajo usia 15 tahun ke atas telah menamatkan jenjang pendidikan dasar, yakni setingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Meskipun demikian, masih ada 19,84 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah.
5. Jumlah sekolah di Kabupaten Wajo pada Tahun Ajaran 2023/2024 yang berada di bawah naungan Kemendikbud didominasi oleh yang berstatus negeri dibandingkan swasta, kecuali jenjang TK. Sedangkan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama didominasi yang berstatus swasta.
6. Rasio murid-guru di Wajo pada Tahun Ajaran 2023/2024 masih berada di bawah standar ideal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17.

LAMPIRAN

Lampiran 1. RSE (*Relative Standar Error*) Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023

Angka Partisipasi Sekolah	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS 7-12	0,00	0,51	0,25	0,00	1,31	0,66
APS 13-15	5,90	7,11	4,68	6,69	7,78	5,23
APS 16-18	13,44	9,72	8,30	12,48	14,41	9,83

Catatan: L=Laki-laki; P = Perempuan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022 dan 2023

Lampiran 2. RSE (*Relative Standar Error*) Angka Partisipasi Murni menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo (Persen), 2022 dan 2023

Angka Partisipasi Murni	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APM SD	0,00	0,51	0,25	0,40	1,31	0,69
APM SMP	12,00	11,12	8,33	14,29	11,38	9,27
APM SMA	15,05	12,36	9,80	14,30	17,73	11,76

Catatan: L=Laki-laki; P = Perempuan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022 dan 2023

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

Jl. Veteran No. 2 Sengkang
e-mail : bps7313@bps.go.id
website : wajokab.bps.go.id